

**SITUASI OTORITATIF ARSITEK  
(Bagian Pertama dari Essay : Arsitektur Futurovernakularis - Suatu Konsekuensi Probabilistik Degradasi Otoritas Arsitek)**

Oleh :

**Octavianus H. A. Rogi**

(Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi)

**Abstrak**

Tulisan ini merupakan penggalan pertama dari essay penulis yang berjudul "Arsitektur Futurovernakularis – Sebuah Konsekuensi Probabilistik Degradasi Otoritas Arsitek". Pemikiran utama dalam essay ini adalah tentang probabilitas tergerusnya otoritas profesional arsitek seiring waktu yang ditandai dengan kehadiran karya arsitektur yang dilabel penulis dengan istilah futurovernakularis. Sebutan ini berasosiasi dengan karya arsitektural masa nanti (futuro) yang terciptakan sebagai karya yang hadir tanpa campur tangan arsitek profesional (vernakularis), sebagaimana salah satu premis dasar definisi politetis arsitektur vernakular. Dalam essay yang lengkap, argumentasi hipotesis di atas dielaborasi melalui sejumlah pendekatan. Dalam tulisan ini secara khusus akan dipaparkan argumentasi yang dielaborasi berdasarkan pendekatan melalui pemahaman terhadap ragam otoritas peran arsitek serta fakta kembang susutnya seiring waktu. Secara garis besar akan dikemukakan pemahaman umum tentang situasi otoritatif arsitek yang sifatnya delegatif dalam konteks koneksi antara arsitek dengan pihak klien. Dikemukakan pula tentang tendensi degradasi peran arsitek sejak masa lalu hingga saat ini serta posibilitasnya di masa depan.

Melalui pemaparan dalam tulisan ini untuk sementara dapat disimpulkan bahwa tendensi degradasi peran dan otoritas arsitek dalam aktivitas rancang bangun merupakan suatu hal yang realistis. Argumentasi utama yang mengemuka adalah fakta bahwa otoritas arsitek secara mendasar merupakan otoritas yang delegatif sifatnya dalam konteks simbiosis arsitek-klien. Argumentasi ini juga diperkuat dengan indikasi kemungkinan perkembangan kapasitas dan perilaku klien yang merupakan sumber otoritas delegatif sang arsitek. Seiring berkembangnya kapasitas kalangan klien terkait aspek rancang bangun, maka perilakunya akan semakin mendorong untuk menafikan eksistensi kalangan arsitek. Argumentasi ini perlu dikembangkan lagi dengan melihat faktor pendorong yang lain bagi perubahan kapasitas dan perilaku kalangan klien ini. Dukungan terhadap argumentasi ini akan dielaborasi pada dua tulisan lain yang berbeda, yang masing-masing akan mengungkap tentang deduksi dukungan teori proses desain tentang potensi degradasi otoritas arsitek serta dampak aplikasi teknologi komputer dalam kegiatan rancang bangun yang berpotensi "menggantikan" posisi arsitek dalam simbiosis klasik arsitek-klien.

Kata kunci : otoritas arsitek, arsitektur futurovernakularis, simbiosis arsitek-klien

**I. PENDAHULUAN**

Tulisan ini merupakan penggalan pertama dari essay penulis yang berjudul "Arsitektur Futurovernakularis – Sebuah Konsekuensi Probabilistik Degradasi Otoritas Arsitek". Pemikiran utama dalam essay ini adalah hipotesis tentang probabilitas mudarnya otoritas profesional arsitek seiring waktu, yang ditandai dengan berkembangnya kehadiran karya arsitektur yang dilabel dengan istilah arsitektur futurovernakularis. Sebutan ini berasosiasi dengan karya arsitektural di

masa nanti (futuro) yang terciptakan sebagai karya yang hadir tanpa campur tangan arsitek profesional (vernakularis), sebagaimana salah satu premis dasar dari definisi politetis arsitektur vernakular.

Dalam essay yang lengkap, argumentasi terhadap hipotesis di atas, dielaborasi melalui serangkaian pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah melalui pemahaman terhadap pengertian otoritas, rentang otoritas serta fakta kembang susut otoritas arsitek yang identik dengan peran profesionalnya dari masa lalu hingga saat ini bahkan kemungkinan perannya di masa yang

akan datang. Pendekatan yang kedua adalah melalui peninjauan terhadap peran dan otoritas arsitek dalam teori tentang proses desain dan evolusinya. Pendekatan yang ketiga adalah melalui pemahaman tentang dampak introduksi teknologi komputer dalam proses perancangan arsitektur yang berpotensi merombak simbiosis tradisional antara arsitek dan klien.

Secara khusus dalam tulisan ini, substansi yang akan dipaparkan adalah argumentasi yang dielaborasi berdasarkan pendekatan yang pertama. Secara garis besar, dalam tulisan ini akan dikemukakan tentang pengertian “otoritas” serta bagaimana situasi otoritatif seorang arsitek. Dalam pemahaman tentang situasi otoritatif arsitek akan diargumentasikan bagaimana otoritas arsitek yang sifatnya delegatif dalam konteks koneksitas antara arsitek dengan pihak klien. Selanjutnya dikemukakan pula tentang tendensi degradasi peran dan otoritas arsitek sejak masa lampau hingga saat sekarang ini serta posibilitasnya di masa depan. Secara sederhana, konstruksi argumentasi yang disajikan di sini, selain dikembangkan secara personal oleh penulis, juga didukung oleh sejumlah referensi kepustakaan yang relevan.

## **II. “OTORITAS” SECARA UMUM**

### **A. Pengertian Otoritas**

Secara etimologis, kata “otoritas” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata “*authority*” dalam bahasa Inggris yang pengertian populernya adalah “*the ability to make people do what you want, just by being who you are*”. Kata

“*authority*” berasal dari kata Latin “*auctoritas*”, yang berarti karya cipta, saran, pendapat, pengaruh atau perintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata otoritas didefinisikan sebagai kata benda (nomina) yang berarti :

- kekuasaan yang diberikan pada lembaga masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya;
- hak untuk bertindak;
- kekuasaan; wewenang;
- hak melakukan tindakan / membuat peraturan untuk memerintah orang lain

### **B. Jenis Otoritas**

Dalam konteks sosiologis, Max Weber mengemukakan konsep “*herrschaft*” (dominasi), yang dalam translasi bahasa Inggris diartikan sebagai otoritas (*authority*). Weber memperkenalkan tiga tipe dominasi yang juga diterjemahkan sebagai tiga tipe otoritas, yang meliputi :

- *Otoritas Legal-Rasional*. Otoritas yang berdasarkan berbagai aturan formal dan hukum yang berlaku.
- *Otoritas Tradisional*. Otoritas yang diperoleh melalui tradisi atau kebiasaan dan kerangka struktur sosial yang eksis dalam jangka panjang.
- *Otoritas Kharismatik*. Sang pemimpin meyakini (dan diyakini oleh pengikutnya) bahwa dia memperoleh sesuatu yang istimewa yang dianggap superior bahkan terhadap otoritas legal-rasional dan tradisional yang ada.

Dalam pandangan yang lain, otoritas juga dikategorikan atas empat tipe yang deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut:

- *Otoritas Kepakaran.* Otoritas ini berakar pada pengetahuan, pengalaman, keahlian berdasar edukasi / pelatihan seseorang.
- *Otoritas Pekerjaan.* Konsep otoritas ini adalah saling pengertian dan kesepakatan atas deskripsi tugas tertentu.
- *Otoritas Komitmen.* Otoritas ini hadir melalui pengertian, persetujuan dan kontrak yang dibuat seseorang dalam konteks hubungan sosial kesehariannya.
- *Otoritas Kekuasaan.* Otoritas ini terkait dengan hirarkhi dalam suatu organisasi.

### **III.SITUASI OTORITATIF ARSITEK**

#### **A. Otoritas Arsitek : Berkah Historis**

Otoritas arsitek bukanlah merupakan suatu keniscayaan. Arsitek dan otoritasnya harus dilihat sebagai suatu “berkah” perjalanan historis perkembangan peradaban manusia, saat seorang individu, karena kecakapannya dalam hal rancang bangun, mendapatkan “mandat sosial” dari masyarakatnya untuk menjadi seorang ahli dan memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu hal yang terkait dengan basis kecakapannya. Penghadiran objek-objek arsitektural berupa lingkungan binaan, pada masa awal perkembangan peradaban manusia, praktis terlepas dari peran pihak profesional spesialisik yang saat ini berlabel arsitek. Lingkungan binaan di era awal ini lazim menghadirkan secara pragmatis oleh mereka yang membutuhkan dan akan menggunakannya. Praktik inilah yang secara teoritis sering disebut dengan proses yang vernakular. Seiring perkembangan zaman, tiap anggota kelompok masyarakat tertentu

cenderung mengembangkan kapabilitasnya secara mandiri dan mulai memiliki kecakapan yang spesialisik, terkait dengan akumulasi pengetahuan dan intensitas pengalamannya dalam hal-hal tertentu. Spesialisasi ini akhirnya bermuara pada pengakuan terhadap kecakapan anggota-anggota komunitas ini hingga masing-masing dianggap memiliki otoritas pada bidang tersebut. Mandat ini selanjutnya mentradisi, dan manakala dalam komunitas tersebut dibutuhkan adanya aktivitas yang terkait dengan kecakapan tertentu, hanya individu dengan otoritas relevanlah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau setidaknya memandu pelaksanaan aktivitas tersebut.

Dalam praktik penghadiran objek-objek lingkungan binaan atau objek arsitektural, peran para spesialis ini telah teridentifikasi hadir dalam beragam komunitas kultural di muka bumi ini sejak masa lalu, sekalipun belum disebut dengan julukan “arsitek”. Sejarah mengenal beragam sebutan untuk individu dengan kecakapan ini misalnya sebutan “undagi” pada komunitas masyarakat etnik Bali. Praktik spesialisik ini tetap eksis hingga saat ini di mana individu spesialis yang hadir telah memiliki label baku sebagai “arsitek”.

Kata “arsitek” secara etimologis berasal dari kata Latin “*architectus*” yang juga berasal dari kata Yunani “*arkhitekton*”. Kata terakhir ini merupakan gabungan kata Yunani “*arkhi*” yang artinya kepala (*chief*) dan kata “*tekon*” yang artinya tukang (*builder*). Dengan demikian, istilah arsitek, dapat diartikan sebagai “kepala tukang” atau

---

seorang individu yang memiliki kapasitas untuk memimpin pelaksanaan kegiatan rancang bangun (*chief/master builder*).

Dalam konteks paparan di atas, otoritas seorang arsitek berkonotasi langsung dengan keahlian yang dimiliki atau bisa disebut dengan otoritas kepakaran (*authority based on expertise*) yang mendapat pengakuan kolektif dari masyarakat umumnya di mana sang arsitek berkiprah. Di masa awal peradaban manusia, seseorang akan memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu lebih dikarenakan intensitas pengalamannya dalam aspek tersebut dan kemampuannya untuk belajar secara otodidak (*learning by doing*).

Seiring dengan berkembangnya masa, pengetahuan dan keahlian seseorang, termasuk di bidang rancang bangun arsitektur, lazim diawali oleh suatu pendidikan formal, yang diikuti rangkaian pengalaman kerja. Hal ini didorong oleh makin kompleksnya sistem sosial kemasyarakatan, sehingga pengakuan terhadap keahlian atau kepakaran seseorang tidak lagi sekedar berdasarkan pada pendapat publik, tapi harus dibuktikan dengan “dokumen legal” tertentu seperti ijazah, sertifikat dan sebagainya.

Dewasa ini, dalam berbagai wilayah yuridis, praktek profesional seorang arsitek pun terikat pada ketentuan legal formal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas publik (pemerintah) atau asosiasi profesi setempat. Hal ini terkait erat dengan fakta bahwa pengetahuan dan keahlian yang dimaksud dalam konteks aksiologisnya akan berasosiasi langsung dengan tanggung jawab

profesi yang dimiliki. Ungkapan terakhir ini menunjukkan bahwa situasi otoritatif seorang arsitek juga dapat dilihat sebagai otoritas yang didasarkan pada pengakuan legal dari otoritas yang lebih tinggi sifatnya dalam konteks yuridis teritorial ataupun akademik-profesional, sedemikian hingga bisa disebut sebagai otoritas legal (*authority based on legal aspect*).

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, otoritas seorang arsitek pada dasarnya merupakan sebuah otoritas delegatif dari pihak lain yang memiliki otoritas sebenarnya. Seseorang yang memiliki sumberdaya tertentu, manakala diperhadapkan pada kebutuhan atau keinginan terkait hadirnya suatu lingkungan binaan tertentu, akan berupaya untuk merealisasikan hal tersebut. Orang tersebut bisa saja (dalam keyakinan atas kemampuan dirinya sendiri) berupaya merancang dan membangun objek tersebut secara mandiri, berdasarkan kebutuhan dan preferensinya. Dalam kemungkinan lainnya, orang tersebut (dalam keyakinan atas ketidakmampuannya) bisa juga memilih orang lain (arsitek) yang kapabilitasnya diyakini untuk melakukannya. Pilihan terakhir ini dapat dilihat sebagai pendelegasian otoritas dari satu pihak ke pihak yang lain, yakni dari pihak yang lazim kita sebut dengan klien kepada seorang arsitek. Deduksi ini dapat diartikan bahwa ada tidaknya otoritas seorang arsitek akan ditentukan oleh ada tidaknya kepercayaan seorang klien yang siap dan dengan sadar mendelegasikan otoritasnya (berdasarkan kesepakatan atau komitmen kontraktual tertentu) kepada sang arsitek untuk

membantunya merancang dan merealisasikan lingkungan binaan yang dibutuhkan dan diinginkan sang klien. Otoritas ini dapat disebut sebagai otoritas pekerjaan / komitmen (*authority based on job / contracts*).

Pemaparan di atas, selain mendeskripsikan macam situasi otoritatif yang dimiliki seorang arsitek, juga mengungkap indikasi kerentanan otoritas seorang arsitek. Premis awal yang terungkap adalah indikasi bahwa keberlanjutan profesi (baca:otoritas) arsitek pada akhirnya akan bertumpu pada perkembangan perilaku klien, dan sejauh mana otoritas kepakaran seorang arsitek masih dipandang berharga dan penting di mata klien.

#### **B. Koneksitas Arsitek-Owner-User**

Eksistensi otoritas seorang arsitek haruslah dilihat dalam konteks koneksitas antara sang arsitek dengan sang klien, di mana otoritas arsitek pada dasarnya adalah otoritas delegatif dari klien. Premis ini ditegaskan oleh Brian Lawson (1990) yang juga mengindikasikan bahwa problem perancangan (dan pembangunan) objek arsitektural pada hakikatnya bersumber dari pemikiran seorang klien yang diperhadapkan pada kebutuhan atau keinginan tertentu.

*“In design, the problem usually originates not in the designer’s mind but with a client or user; .... The designer, unlike the artist, is almost always commissioned; the task, albeit ill-defined, is brought to him. ... The designer himself is often expected to contribute problems too ... to be given some freedom in the definition of the design problem.”*

*(Brian Lawson, 1990)*

Konteks deskripsi permasalahan sang klien tetaplah terbuka untuk diinterpretasi lebih lanjut oleh sang arsitek. Anggapan ini berangkat dari pemahaman bahwa sang klien (yang awam) belum mampu mendeskripsikan problem perancangan tersebut secara baik. Arsitek dengan otoritas kepakarannya dipandang lebih mampu untuk itu. Di sisi lain, terutama didorong oleh upaya untuk mempertahankan reputasinya, sang arsitek akan berupaya memanasifasikan ide-ide problematiknya manakala mendapatkan delegasi otoritas untuk menginterpretasikan kebutuhan / keinginan seorang klien.

Interpretasi sang arsitek terhadap problem perancangan tidaklah bisa berkembang terlampau jauh dan mengingkari esensi problem yang dikemukakan oleh sang klien. Dengan kata lain, ruang interpretasi problem perancangan bagi seorang arsitek tidaklah tak terbatas. Seorang klien bisa saja dianggap tidak mampu merancang secara mandiri dan membutuhkan jasa arsitek. Sekalipun demikian, sang klien tetap saja memiliki kesadaran yang utuh tentang apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, sehingga akan tetap menuntut sang arsitek untuk tidak menafikan hal tersebut dalam interpretasi yang dilakukannya terhadap problem perancangan yang ditugaskan padanya. Artinya, sang arsitek pada akhirnya harus tetap “tunduk” pada apa yang menjadi esensi problem rancangan di benak sang klien. Bagaimanapun juga, bukankah otoritas sang arsitek untuk menangani

problem rancangan ini pada dasarnya bersumber dari sang klien?

Dengan konteks berpikir ini, dapatlah disimpulkan sementara bahwa problem perancangan arsitektural pada akhirnya merupakan kolaborasi pemikiran klien dan arsitek yang dibungkus semacam kesepakatan dalam konteks posisi tawar-menawar yang unik. Sang klien di satu sisi memiliki “*mindset*” tertentu tentang standar performa objek arsitektural tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sisi lain, sang arsitek tetap memiliki egosentris untuk menampilkan “karakter” personalnya dalam rancangan yang ditugaskan padanya. Dalam konteks ini, kita bisa melihat adanya polarisme konstrain perancangan dimana sang klien menempati kutub yang satu dan arsitek pada kutub lainnya. Dengan polarisme seperti ini maka posisi “titik kesepakatan” tentang interpretasi problem perancangan yang dihadapi akan relatif bervariasi berdasarkan kekuatan “posisi tawar” kedua kutub yang terlibat. Kesepakatan bisa saja terjadi lebih “dekat” dengan interpretasi sang arsitek atau justru lebih “berat” pada pemikiran sang klien. Bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana posisi kesepakatan tersebut (terkait dengan beragam aspek tertentu) memiliki tendensi dan posibilitas untuk semakin bergeser ke arah kutub sang klien. Kondisi ini secara asosiatif dapat dicermati sebagai degradasi otoritas arsitek.

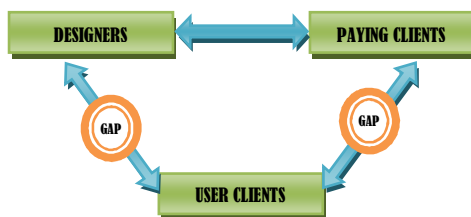
Dalam praktik perancangan dan pembangunan suatu objek arsitektural, konstrain terhadap performa rancangan

tidaklah semata-mata bergantung pada dua pihak sebelumnya, yakni klien dan arsitek. Jika dicermati, tugas yang diserahkan seorang klien pada seorang arsitek tidak hanya terbatas pada objek arsitektural yang nantinya akan digunakan oleh sang klien, tapi justru digunakan oleh individu atau kelompok individu yang lain. Artinya, seorang klien tidak serta merta identik dengan pengguna (*user*). Di sini kita berhadapan dengan derivasi posisi klien menjadi dua kategori lain yakni klien yang menginvestasikan sumberdayanya untuk perancangan dan pembangunan suatu objek atau lazim disebut pemilik proyek (*paying client / owner*) dan klien yang akan menjadi pengguna objek (*user client*). Kondisi ini lazim kita temui di era sekarang di mana praktik desain telah sedemikian luas skalanya yang mengarah ke industrialisasi desain yang memproduksi beragam tipologi objek arsitektural yang bercorak komersial. Objek-objek semacam mal, apartemen, hotel, rumah sakit, sekolah, restoran dan sebagainya merupakan sebagian dari objek arsitektural di mana kita bisa menemukan adanya derivasi posisi klien sebagaimana disebut di atas. Dalam derivasi ini, jelas pula bahwa dalam posisinya yang berbeda, pihak *paying client* akan memiliki pola-pola persepsi dan preferensi yang “harus dibedakan” dengan pola persepsi dan preferensi pihak *user client*, terkait dengan performa objek arsitektur yang akan dirancang / dibangun. Dalam konteks interaksi arsitek-klien, kita diperhadapkan pada hadirnya kutub baru dalam polarisme konstrain perancangan, yakni pihak *user*

*client* atau pengguna. Arsitek juga berkewajiban untuk mengakomodir interpretasi kalangan pengguna, terkait dengan problem perancangan yang dihadapi. Dalam realitanya, khusus pada perancangan objek-objek komersil seperti di atas, interaksi antara arsitek dengan pengguna praktis sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan fakta bahwa kalangan pengguna lazimnya merupakan kelompok individu yang tiap anggotanya memiliki pola perilaku dan *mindset* yang pasti berbeda. Lebih dari itu, individu-individu pengguna pada dasarnya belum eksis secara “*realtime*”, tapi lebih bersifat potensial dan imajinatif. Jurang interaksi ini juga dikemukakan oleh John Zeisel (2006).

*“In mass design like this, designers have two clients : those who pay for what is built and those who use it. The user client has no choice and no control. This situation presents designers with a problem: no matter how much they negotiate with paying clients, it is difficult to plan for the needs of user clients, who are neither well known nor readily available to plan with.”*

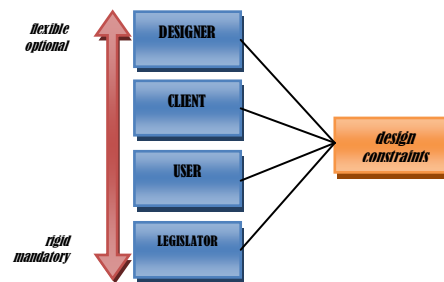
(John Zeisel, 2006)



Gambar 1  
 The User-Needs Gap  
 (John Zeisel, 2006)

Sejauh ini, dalam paparan sebelumnya telah teridentifikasi tiga pihak yang menjadi sumber dari konstrain dalam problem perancangan suatu objek arsitektural, masing-masing adalah pemilik,

pengguna dan arsitek. Brian Lawson (1990) menyebutkan bahwa setidaknya ada satu pihak lainnya yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu pihak regulator. Pernyataan ini berakar pada kenyataan bahwa suatu objek arsitektural akan dirancang untuk mengokupansi tapak yang terletak pada suatu kawasan atau wilayah dengan yurisdiksi tertentu, sedemikian hingga terikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud antara lain adalah ketentuan tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan setempat.



Gambar 2  
 The Generators of Design Constraints  
 (Brian Lawson, 1990)

Dengan ungkapan terakhir ini, jelaslah bahwa dalam aktivitas perancangan / pembangunan objek arsitektural, definisi atau interpretasi problem perancangan akan ditentukan oleh empat pihak yakni arsitek atau perancang, klien (dalam pengertian pemilik), pengguna dan regulator. Dari keempat pihak ini, Lawson mengemukakan, arsitek atau perancang merupakan pihak yang determinasinya paling bersifat fleksibel dan opsional. Di sisi lain, pihak regulator merupakan determinator yang sifatnya paling *rigid* (kaku) dan mandatoris alias tak bisa ditawar. Pernyataan ini sekali lagi memberikan indikasi bahwa otoritas yang

---

dimiliki arsitek dalam suatu aktivitas rancang bangun, merupakan otoritas yang rentan untuk terpinggirkan / terdegradasi.

### **C. Rentang Otoritas Arsitek**

Otoritas seorang arsitek dalam memberikan jasa pelayanan rancang bangun merupakan persoalan yang dapat dilihat dari sudut pandang yang beragam. Para pemilik (*paying client*) bisa saja memandang otoritas sang arsitek sangatlah terbatas bahkan mungkin tidak ada. Di sisi yang lain, mereka justru bisa saja mengharapkan sang arsitek untuk mengontrol segenap aktivitas perancangan bahkan pembangunan objek arsitektural yang dibutuhkan. Para kontraktor dapat mengalami kesulitan untuk memahami desain sang arsitek, sedemikian hingga mereka condong untuk menginterpretasinya secara mandiri dalam realisasi konfiguratifnya. Dalam kemungkinan yang lain mereka justru akan datang berkonsultasi dengan sang arsitek untuk mengkonfirmasi interpretasi rancangannya. Di sisi diri sang arsitek sendiri, dia senantiasa akan berkuat dengan dorongan untuk menjadi prinsipal dalam proses perancangan dan pembangunan (*master builder*), sedemikian sehingga dapat memegang kendali penuh dalam seluruh rangkaian proses rancang bangun.

Menurut Simpson dan Atkins (2005), sekalipun dapat dipengaruhi oleh perilaku kalangan pemilik dan kontraktor, pada kenyataannya otoritas arsitek secara tipikal akan ditentukan oleh dua sumber eksternal yaitu kontrak pelayanan jasa dan kode etik

profesional. Menurut mereka, kemungkinan pelaksanaan otoritas arsitek biasanya terkategori atas tiga hal. Yang pertama adalah mengambil keputusan sekaligus memegang tanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi kepada pihak lain yang akan mengambil keputusan, sehingga hanya memikul “sebagian” dari tanggung jawab atas keputusan tersebut bersama pihak pengambil keputusan. Yang ketiga adalah menyerahkan segenap tanggung jawab kepada pihak-pihak yang lain alias tidak melakukan apapun.

Dalam tulisan yang sama mereka mengungkapkan pula bahwa basis otoritas arsitek dapat dibedakan atas tiga tipe. Yang pertama adalah yang disebut dengan otoritas umum (*common authority*), yakni otoritas arsitek yang terkait langsung dengan lingkup standar pelayanan profesional arsitek yang diatur oleh aturan berdasarkan wilayah yuridis tertentu. Yang kedua adalah otoritas kontraktual, yaitu segenap tugas dan kewenangan atau tanggung jawab arsitek yang diatur dalam kontrak dengan pihak pemilik proyek. Yang terakhir adalah yang disebut dengan otoritas eksklusif seorang arsitek yang terletak pada kapabilitasnya terkait aspek estetis dari rancangan. Dalam praktiknya, otoritas eksklusif ini sering menjadi “momok” bagi kalangan pemilik. Lazim terjadi, otoritas estetis ini secara kontraktual tidak diserahkan penuh kepada arsitek (pemilik pada umumnya memiliki preferensi estetisnya sendiri yang tidak jarang kontradiktif dengan preferensi arsitek). Umumnya, sang arsitek hanya



diberikan otoritas untuk memutuskan persoalan-persoalan estetis manakala terkait langsung dengan tantangan yang muncul dari pihak eksternal.

*"Chief among the architect's exclusive authority is probably aesthetic design. On most projects, the architect is generally looked upon as the party involved who is most qualified to address matters of aesthetic intent. .... However, the owner-architect agreements, ... authorize the architect to decide aesthetic issues if related to a claim or dispute."*

*(G. A. Simpson & J. B. Atkins, 2005)*

Mathew Van Kooy (2007) memaparkan bahwa otoritas pada dasarnya dapat dibedakan atas dua tipe yang disebutnya dengan otoritas praktis dan otoritas teoritis. Seseorang yang memiliki otoritas praktis adalah pihak yang memiliki hak dan kekuasaan untuk dipatuhi. Van Kooy dengan kontroversial berpendapat bahwa seorang arsitek dalam aktivitas kesehariannya sama sekali tidak memiliki otoritas praktikal semacam ini. Sekalipun demikian, dia menyatakan bahwa arsitek tetap dapat merancang objek arsitektur yang dapat menunjukkan otoritas praktis.

*It is hardly contentions to assert that the architect as an agent has no practical authority at all during the execution of their actions in an everyday sense. Although architects do not possess practical authority they can design objects that manifest and make real practical authority.*

*(Mathew Van Kooy, 2007)*

Menurut Van Kooy, otoritas teoritis menyiratkan bahwa dalam sejumlah bidang, melalui pengetahuan yang spesialisik seseorang bisa mengaku diri sebagai seorang yang memiliki keahlian atau kepakaran.

Otoritas teoritis memanfaatkan pengetahuan sebagai sumber otoritas seseorang terhadap yang lain. Otoritas teoritis harus dilihat dalam konteks hubungan antara seorang pakar dengan seorang awam. Yang menjadi esensi dalam suatu situasi saat seorang ahli dan seorang awam saling berinteraksi adalah ketidakseimbangan skill dan informasi (dalam suatu bidang tertentu) sedemikian hingga seseorang (sang ahli) memiliki otoritas terhadap yang lain (sang awam).

Selanjutnya, jika Van Kooy mengatakan bahwa arsitek tidaklah memiliki otoritas praktis yang nyata, bagaimana dengan otoritas teoritis dari arsitek? Van Kooy mengungkap bahwa kalangan kritikus cenderung menganggap bahwa kalangan arsitek kontemporer dewasa ini tidak mampu / tidak ingin mengembangkan pengetahuan arsitekturalnya. Van Kooy menekankan indikasi bahwa kalangan arsitek kontemporer saat ini semakin bergantung pada berbagai teori dan metode dari disiplin lain di luar arsitektur, sebagai cara melegitimasi hasil karya mereka. Saat para arsitek bersikap seperti ini sebenarnya mereka menafikan kemampuan dan otonomi dari pengetahuan intrinsik mereka. Meningkatnya ketergantungan terhadap pengetahuan ekstrinsik di luar bidang arsitektur akan semakin mengaburkan spesifikasi epistemologi disiplin arsitektur. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa proses pemutakhiran pengetahuan arsitektural cenderung berkurang derajatnya dan berimplikasi pada pelemahan eksistensi otoritas teoritis bagi kalangan arsitek.

---

#### SITUASI OTORITATIF ARSITEK

(Bagian Pertama dari Essay : Arsitektur Futurovernakularis – Suatu Konsekuensi Probabilistik Degradasi Otoritas Arsitek)

*Increasingly, architects are subscribing to theories and methods that are traditionally outside the discipline of architecture to authorise or legitimise their architectural designs. ... This increasing reliance on knowledge that is extrinsic to the discipline is detrimental as it dissipates the specificity of the architect's epistemology, ... This poses a serious difficulty for the authority of the architect's knowledge and knowing as an individual and discipline as a whole.*

*(Mathew Van Kooy, 2007)*

#### **D. Kembang Susut Otoritas Arsitek**

##### **1. Peran Masa Lampau : Master Builder**

Pada masa lalu, seorang arsitek, terlepas dari apapun julukannya saat itu, pernah mengalami era kejayaan dalam konteks otoritas yang dimilikinya. Seiring dengan berjalannya proses desain yang vernakular, dalam suatu komunitas tertentu muncul seseorang yang karena pengetahuan dan pengalamannya memiliki keahlian khusus dalam bidang rancang bangun. Oleh komunitasnya dia mendapatkan kepercayaan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam hal aktivitas rancang bangun. Di pihak yang lain, dalam komunitas yang sama muncul pula individu-individu yang memiliki "surplus" sumberdaya, khususnya dalam hal merealisasikan kebutuhan dan keinginannya akan suatu objek lingkungan binaan tertentu. Alih-alih berupaya merealisasikan kebutuhannya itu secara mandiri sebagaimana tradisi vernakular, individu-individu ini mulai melirik eksistensi "otoritas" rancang bangun yang ada di dalam komunitasnya dan memberikan kepercayaan penuh padanya untuk merealisasikan kebutuhannya tersebut dengan menyediakan segenap sumberdaya yang dibutuhkan sang

individu ahli tersebut. Dalam konteks seperti inilah otoritas profesional atau kontraktual seorang "arsitek" mulai terbentuk, di mana ada pendelegasian otoritas dari seseorang yang selanjutnya dapat disebut sebagai klien kepada seseorang yang lain berdasarkan otoritas kepakaran yang dia miliki. Dalam momentum awal profesionalisasi kepakaran seorang "arsitek" ini, rentang otoritas yang dimilikinya terbilang luar biasa. kepadanya diberikan kewenangan penuh untuk melakukan aktivitas perancangan sekaligus pembangunan dari objek lingkungan binaan yang dibutuhkan oleh sang klien. Dalam kondisi inilah julukan "*master builder*" bagi seorang arsitek memperoleh signifikansinya. Hal ini diungkapkan pula oleh Alexander D. Tuttle (2012).

*"Architects were once key players in construction projects. They were as involved during construction as they were during design. Indeed, the term "master builder" was quite appropriate, as architects not only conceived and drew plans for structures, but also supervised construction and controlled costs for owners."*

*(Alexander D. Tuttle, 2012)*

Menurut Tuttle, peran arsitek sebagai "*master builder*" pada kenyataannya hanyalah memori indah masa lalu. Seiring berkembangnya peradaban, profesionalitas dalam bidang rancang bangun telah mengalami diversifikasi yang intens, bermuara pada hadirnya ragam peran atau otoritas yang semakin variatif. Sejumlah individu "cenderung" mengembangkan kapabilitasnya dalam hal aktivitas merancang, kelompok yang lain lebih terorientasi pada kepakaran dalam hal teknik

konstruksi dan sebagainya. Kondisi ini dianggap telah membawa implikasi langsung pada degradasi otoritas seorang arsitek, yang pada akhirnya lebih memiliki peran yang nyata, terbatas pada aktivitas merancang. Otoritas dalam aktivitas pembangunan objek pada akhirnya mulai beralih pada spesialis lain yang disebut dengan konstruktor.

*“Since the advent of construction managers ..., architects have witnessed their authority over construction projects erode. Architects no longer serve as the “Master Builder.” Instead, they are relegated to the sidelines of the construction process upon completing their design documents.”*

*(Alexander D. Tuttle, 2012)*

Pandangan di atas barangkali terlalu berlebihan. Jika kita cermati dewasa ini, praktik profesi arsitek dalam konteks peran sebagai *“master builder”* sebenarnya masih cukup eksis. Kita masih dengan yakin bisa mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan kita akan menemukan seorang arsitek yang memperoleh order untuk merancang objek arsitektural tertentu juga pada akhirnya mendapatkan order tambahan untuk melakukan proses konstruksi. Sayangnya, kondisi semacam ini lebih sering terjadi dalam konteks proyek konstruksi yang sederhana dan terbilang personal. Dalam praktik industri konstruksi dewasa ini, seorang arsitek cenderung hanya memiliki otoritas yang nyata dalam tahapan perancangan. Dalam proyek konstruksi yang kompleks, otoritas merancang seorang arsitek pun menjadi terbatas pada aspek-aspek tertentu. Perancangan objek yang bersangkutan lazim dilakukan secara

kolaboratif oleh sekelompok orang dengan kepakaran spesialisik yang berbeda. Otoritas seorang arsitek akan lebih berasosiasi dengan kapasitasnya dalam penggabungan gubahan bentuk dan ruang dengan asosiasi estetis. Aspek rancangan yang lain seperti struktur dan utilitas cenderung akan terdelegasikan pada profesional tertentu yang memiliki spesialisasi dalam hal tersebut. Sekalipun dalam tim perancang tersebut arsitek cenderung masih akan berposisi sebagai *“team leader”*, secara praktis otoritasnya telah mengalami *“pemiskinan”* terkait dengan keterlibatan sejumlah individu dengan kepakaran spesialisik tersebut. Lebih jauh lagi, dalam tahapan konstruksi atau pembangunan objek yang bersangkutan, otoritas sang arsitek secara praktis telah beralih pada pihak yang lain dalam hal ini adalah pihak manajer konstruksi. Peran arsitek dalam tahapan ini relatif terbatas pada supervisi teknis berkala, yang dalam konteks pengambilan keputusan, determinasinya tidaklah sekuat saat posisi sang arsitek sebagai *“master builder”*.

## **2. Alternasi Peran Masa Kini**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa seiring waktu peran arsitek telah tererosi sejalan dengan hadirnya pihak profesional yang baru, khususnya dalam tahapan konstruksi suatu objek lingkungan binaan, sedemikian sehingga domain peran arsitek telah makin mengerucut (baca: menyempit) pada lingkup aktivitas perancangan semata. Dalam bagian ini akan dielaborasi tentang otoritas arsitek dalam konteks aktivitas

---

merancang yang ternyata juga secara gradual mengalami pemiskinan makna.

Dalam kerangka pikir yang sikuensial degradasional, otoritas arsitek dalam kegiatan perancangan dapat diderivasi atas tiga kondisi, masing-masing adalah peran sebagai “*master designer*”, sebagai rekomendator solusi rancangan (*design solution recommendator*) dan sebagai penyedia informasi tentang konstrain rancangan (*design constraint information provider*). Ketiga peran ini dapat dilihat sebagai peran alternatif opsional seorang arsitek manakala berhadapan dengan tugas perancangan objek arsitektural tertentu.

**a. Arsitek - Master Designer**

Peran alternatif yang pertama dari seorang arsitek dalam kegiatan perancangan adalah peran dengan otoritas yang masih terbilang membanggakan. Dalam konteks ini seorang arsitek mendapatkan mandat sepenuhnya dari sang klien untuk menentukan segenap aspek performa desain dari objek lingkungan buatan yang dibutuhkan dan diinginkannya. “*Master designer*” merupakan sebutan yang terbilang tepat untuk menggambarkan peran ini. Dalam sudut pandang interaksi antara klien-arsitek, hal ini biasanya terjadi dalam suatu model polarisme tawar menawar yang “tidak seimbang” dalam pengertian bahwa dalam ke”pakar”annya sang arsitek mampu mendominasi sang klien dalam ke”awam”annya. Dalam hal ini, sang klien melihat sang arsitek sebagai sosok yang lebih superior dalam hal pengetahuannya tentang aspek desain, sedemikian sehingga

mempercayakan segenap keputusan tentang performa desain kepada si arsitek.

Implisit dalam kondisi ini adalah karakteristik klien yang sangat rendah wawasannya tentang aspek rancang bangun dan sikapnya yang kurang tegas dalam hal apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan serta keinginannya. Sebab lain yang mendorong situasi ini adalah latar belakang reputasi sang arsitek yang otoritas kepakarannya memang diakui oleh masyarakat pada umumnya. Secara historis posisi peran yang seperti ini bisa juga dikatakan sebagai warisan derivatif dari pola interaksi klien-arsitek yang memposisikan arsitek sebagai “*master builder*”, tetapi dengan eliminasi sebagian peran sebelumnya yakni sebagai “*master constructor*”.

**b. Arsitek - Rekomendator Solusi Desain**

Alternatif peran kedua, pada dasarnya adalah peran yang sedikit banyak mengindikasikan berkurangnya determinasi pertimbangan seorang arsitek dalam hal pengambilan keputusan tentang performa desain yang akan dihasilkan. Dalam peran ini arsitek tidak lagi merupakan otoritas yang dominan dalam pengambilan keputusan. Keputusan pada akhirnya akan dilakukan secara kolaboratif dalam konteks interaksi klien-arsitek. Arsitek dengan kepakaran dan reputasinya lebih banyak berperan sebagai rekomendator solusi desain tertentu yang diproyeksikan sedemikian rupa untuk akomodatif terhadap kebutuhan dan keinginan sang klien. Klien secara khusus akan mengambil posisi sebagai evaluator sekaligus konfirmator pengambilan

keputusan terkait dengan apakah rekomendasi sang arsitek sudah dapat diterima atau harus diperbaiki lagi. Dalam banyak kasus, pengajuan rekomendasi akan terjadi secara berulang kali dengan serangkaian perbaikan sebelum proposisi desain tersebut disetujui oleh sang klien. Pada momen tertentu sang klien bahkan dapat mengajukan versi konsep desainnya sebagai bahan komparasi atau “kritik” terhadap rekomendasi si arsitek. Namun demikian, secara praktis biasanya hasil akhir desain akan tetap lebih banyak bersumber dari interpretasi sang arsitek.

Dalam konteks peran seperti ini, tersirat bahwa pola interaksi antara klien dan arsitek tidak lagi didominasi oleh si arsitek dan senantiasa diwarnai dengan mekanisme “tawar menawar gagasan” yang intens. Hasil akhir hanya akan dicapai melalui suatu alur pengambilan keputusan yang memposisikan si klien sebagai otoritas yang determinasinya kurang lebih setara bahkan lebih dari sang arsitek. Implisit dalam kondisi ini adalah karakteristik klien yang semakin berkembang wawasannya tentang aspek rancang bangun, dan yang semakin tegas sikapnya dalam “memperjuangkan” interpretasi, persepsi dan preferensinya mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Prakondisi lain yang mendorong hadirnya situasi seperti ini bisa juga bersumber dari reputasi sang arsitek yang kurang cemerlang sehingga posisi tawarnya terkait dengan otoritas kepakarannya menjadi lemah.

### **c. Arsitek : Informan Konstrain Desain**

Alternatif peran ketiga merupakan peran yang level determinasinya dalam pengambilan keputusan telah berada pada titik yang terendah. Dalam peran ini arsitek bisa dikatakan hampir tidak memiliki otoritas apapun dalam pengambilan keputusan. Arsitek pun tidak lagi secara aktif mengajukan rekomendasi solusi atau konsep desain tetapi terbatas pada pemberian informasi terkait dengan konstrain rancangan yang harus diperhatikan sang klien. Sang klien akan menjadi pihak yang aktif dalam pengagasan konsep rancangan berdasarkan preferensinya dan arsitek akan berperan menjadi visualitator gagasan sang klien lewat beragam medium (terutama medium gambar). Saat gagasan sang klien tervisualisasi lewat gambar, sang arsitek akan mengambil posisi sebagai kritikus dan memberikan informasi tentang kelebihan dan terutama kekurangan gagasan tersebut, sedemikian sehingga secara simultan gagasan tersebut akan mengalami serangkaian perubahan untuk perbaikan, sampai pada saat sang klien memutuskan bahwa perbaikan tertentu merupakan yang terakhir dan desain selesai dilaksanakan.

Dalam konteks ini, salah satu prakondisi yang menentukan adalah karakteristik wawasan rancang bangun dari sang klien yang terbilang sudah cukup baik serta reputasi sang arsitek yang kurang cemerlang sehingga posisi tawarnya dalam penyampaian gagasan menjadi kurang “bernilai” di mata sang klien. Dalam situasi ini kepakaran arsitek yang masih di hargai

adalah kemampuan presentatifnya atau kemampuan visualisasi teknisnya tentang konsep rancangan serta wawasannya menyangkut berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan bagi peng gagasan suatu konsep rancangan yang berkualitas.

Jika mengamati kemungkinan alternasi peran arsitek di atas, barangkali dapat dikatakan bahwa alternatif peran yang pertama dan kedua merupakan peran yang memang teramatinya secara nyata dalam praktik perancangan profesional saat ini, sementara peran yang ke-tiga belum cukup eksis keberadaannya. Jika dicermati lebih teliti lagi, dapat pula dikatakan bahwa ada indikasi kronologis dari ke-tiga alternatif peran di atas. Peran yang pertama, sekalipun masih sering dilakoni para arsitek, pada kenyataannya mulai berangsur-angsur berkurang intensitasnya. Yang sering teramatinya sekarang, terutama pada kasus-kasus proyek rancang bangun yang sifatnya personal, peran kedua adalah peran yang paling sering dilakoni. Adapun peran yang ketiga pada dasarnya masih kurang intensitasnya namun menunjukkan trend yang meningkat. Premis yang mengemuka di sini adalah bahwa alternasi peran arsitek sangat terkait dengan perkembangan karakteristik dan perilaku klien di satu sisi dan reputasi kepakaran sang arsitek di sisi yang lain.

### **3. *Posibilitas Peran Masa Depan***

Indikasi trend alternasi peran arsitek sebagaimana dipaparkan di atas, pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan pemaparan dalam segmen ini yang mencoba

mengulas potensi peran arsitek dalam konteks pikir masa nanti. Perlu ditekankan di sini bahwa pemaparan berikut ini sifatnya tidaklah konklusif dan lebih bersumber dari premonisi penulis belaka yang barangkali sangat subjektif. Sekalipun demikian, premonisi ini tentunya hadir dengan argumentasi tertentu.

#### ***a. Arsitek Animator / Juru Gambar***

Dalam konteks masa nanti, trend perubahan peran arsitek dalam suatu proyek rancang bangun dikuatirkan akan terjerumus pada peran yang level otoritasnya sangat rendah dan mendekati titik nadir kebanggaan arsitek sebagai seorang profesional. Saat seorang klien telah memiliki wawasan aspek rancang bangun yang cukup memadai atau memiliki “sumber lain” yang dapat memperkaya referensinya tentang beragam preseden arsitektural, saat diperhadapkan pada kebutuhan akan hadirnya suatu objek arsitektural, sang klien akan memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk mengembangkan gagasan personalnya tentang objek yang bersangkutan. Saat mempekerjakan seorang arsitek, alih-alih mengharapkan gagasan rancangan dari si arsitek, sang klien justru lebih banyak memanfaatkan sang arsitek untuk “memvisualisasikan” gagasan yang bersumber dari benak sang klien. Dalam tataran tertentu, dalam visualisasi ini mungkin sang arsitek masih diharapkan untuk membantu klien untuk menterjemahkan lebih lanjut konsep sang klien, khususnya pada hal-hal yang sifatnya mendetail. Namun demikian, pada tataran

yang lain, saat referensi sang klien tentang detail teknis arsitektural cukup memadai, visualisasi ini pada akhirnya akan terlepas sama sekali dari “intervensi” buah pikir sang arsitek. Dalam situasi ini peran sang arsitek pada dasarnya dapat dilihat hanya sekedar seorang *drafter* atau animator belaka. Dengan demikian, dalam konteks kontraktual yang dimilikinya, otoritas kepakaran arsitek yang masih dihargai hanyalah *skill* atau keterampilan presentasinya, tidak lebih.

Bagi sebagian besar pembaca yang berlatar belakang sebagai arsitek, ungkapan di atas mungkin akan ditanggapi dengan sinis. Tanggapan ini pasti akan berakar pada paradigma yang menganggap bahwa seorang klien senantiasa merupakan pihak yang awam terhadap “ilmu” arsitektur dan oleh karenanya tidak akan pernah memiliki kapasitas untuk mengembangkan gagasannya secara mandiri tanpa adanya “bisikan” dari mereka yang bergelar arsitek. Benarkah dalih ini? Barangkali pihak yang sinis perlu melirik lagi fakta bahwa pada era proses desain vernakular tidaklah terhitung banyaknya produk rancang bangun yang hadir tanpa campur tangan arsitek dan semata-mata bersumber dari pemikiran pragmatis orang awam yang menghadirkan objek tersebut. Kapabilitas masyarakat awam ini pastinya juga tidak akan terlepas dari fakta universal lain bahwa sebagai manusia mereka memiliki anugerah yang relatif sama (dengan mereka yang bergelar arsitek) dalam bentuk massa otak yang kurang lebih sama, sedemikian rupa hingga

secara otodidak dapat mengembangkan wawasannya secara mandiri.

#### **b. *Arsitek Nonjob (?)***

Titik nadir otoritas arsitek dalam peran profesionalnya di masa nanti adalah situasi saat sang arsitek tidak lagi mendapatkan kontrak untuk membantu klien dalam merealisasikan kebutuhannya atas suatu objek arsitektur alias “*jobless*”. Kondisi ini adalah sesuatu yang jauh lebih buruk dari peran arsitek yang hanya sekedar animator atau juru gambar. Dalam peran sebagai *drafter* / animator, setidaknya masih ada otoritas kepakaran arsitek yang dihargai.

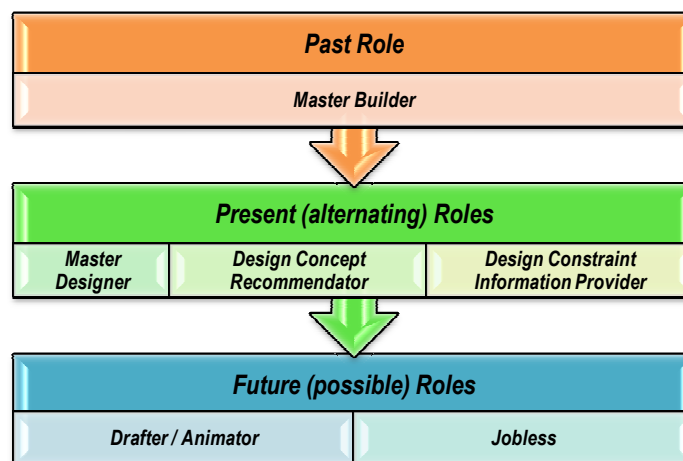
Peluang terjadinya situasi ini di masa depan akan sangat tergantung pada kapabilitas sang klien untuk menafikan otoritas kepakaran arsitek dalam memvisualisasikan suatu gagasan rancangan. Dalam peran sebelumnya, dengan kepercayaan dirinya untuk menggagas perubahan arsitektural, seorang klien masih “terkendala” untuk memvisualisasikan gagasan dalam benaknya. Untuk itu ia masih membutuhkan jasa seorang arsitek untuk menjadi medium visualisasi. Untuk selanjutnya, jika seorang klien dengan cara tertentu pada akhirnya juga mampu memiliki kapabilitas untuk memvisualisasikan gagasan arsitekturalnya, maka peran terakhir dari seorang arsitek serta merta akan sirna.

Terkait dengan asumsi ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah mungkin seorang klien yang “awam” akan sampai pada tataran kapabilitas yang seperti ini. Pihak oposan terhadap tulisan ini mungkin akan sekali lagi sinis dan spontan

mengatakan tidak mungkin. Argumennya adalah, walaupun situasi ini terjadi, itu sama artinya bahwa sang klien telah bertransformasi menjadi seorang arsitek secara mandiri, walaupun dalam status gelar yang “ilegal” karena tidak melalui program pendidikan yang formal ataupun sertifikasi profesional yang relevan. Argumentasi ini tidaklah keliru dalam pengertian bahwa sebagai manusia sang klien memiliki sumberdaya yang memungkinkannya untuk belajar dan berlatih secara otodidak.

Dalam konteks pikir yang futuristik ini, pada dasarnya penulis juga memiliki sudut pandang yang sebenarnya sejalan dengan pola pikir oposisi seperti di atas. Artinya, penulis pun tetap saja tidak yakin bahwa dalam ke”awam”an seorang klien, dia pada akhirnya mampu memiliki kapabilitas pengetahuan dan keahlian yang “setara” dengan arsitek yang mencapai status profesionalnya ini dengan melewati serangkaian pendidikan dan pelatihan formal yang relatif panjang waktunya. Namun

demikian, situasi profesi tanpa peran dari sang arsitek di benak penulis tetaplah sesuatu yang probabilitasnya cukup signifikan, tetapi relatif terlepas dari argumentasi sebelumnya. Argumentasi yang lebih mendasar menurut penulis adalah fakta menyangkut kehadiran entitas lain di dalam situasi interaksional antara klien dan arsitek, yaitu sang “komputer”. Kehadiran komputer dalam konteks interaksi arsitek dengan klien pada mulanya lebih pada peran sebagai kompiatriot sang arsitek. Dalam visi penulis, peran ini pada akhirnya justru akan bergeser ke arah pihak klien dan akan asosiatif dengan tergusurnya urgensi kehadiran arsitek sebagaimana berlaku dalam pola interaksi yang lama. Menyangkut visi ini secara lebih lengkap akan dipaparkan dalam tulisan / artikel yang lain, yang juga harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan tulisan ini dan menyatu sebagai essay tentang arsitektur futurovernakularis yang telah diintroduksi pada bagian awal tulisan ini.



Gambar 3  
Perkembangan Peran & Otoritas Arsitek



#### IV. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Melalui pemaparan dalam tulisan ini, untuk sementara dapatlah disimpulkan bahwa tendensi degradasi peran dan otoritas arsitek dalam aktivitas rancang bangun merupakan suatu hal yang realistis. Argumentasi yang mengemuka adalah bahwa otoritas arsitek secara mendasar merupakan otoritas yang delegatif sifatnya dalam konteks koneksitasnya dengan kalangan klien. Argumentasi ini diperkuat dengan kemungkinan perkembangan kapasitas dan perilaku klien yang merupakan sumber otoritas delegatif dari arsitek. Seiring dengan berkembangnya kapasitas klien tentang aspek rancang bangun, perilakunya akan semakin terdorong untuk menafikan eksistensi kalangan arsitek.

Argumentasi ini masih perlu dikembangkan lagi dengan melihat faktor pendorong yang lain bagi perubahan kapasitas dan perilaku kalangan klien. Dukungan terhadap kesimpulan ini pada gilirannya akan dielaborasi pada dua tulisan lain yang berbeda, yang masing-masing akan mengungkap tentang deduksi dukungan teori proses desain tentang potensi degradasi otoritas arsitek serta dampak aplikasi teknologi komputer dalam kegiatan rancang bangun yang berpotensi “menggantikan” posisi arsitek dalam simbiosis klasik arsitek-klien. Tulisan ini beserta kedua tulisan yang dimaksud secara keseluruhan dapat dilihat sebagai suatu essay yang mengungkap gagasan tentang prospek kehadiran fenomena arsitektur futurovernakularis yang

menjadi konsekuensi logis degradasi otoritas kalangan arsitek di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Broadbent Geoffrey, 1973, *"Design in Architecture"*, © John Wiley & Sons, New York, 1973
- Lang Jon, 1987, *"Creating Architectural Theory; The Role of the Behavioral Sciences in environmental Design"*, © Van Nostrand Reinhold, New York.
- Lawson Brian, 1990, *"How Designers Think"*, © Butterworth Architecture, The University Press, Cambridge.
- Rogi Octavianus H. A. 2011, *"Arsitektur Vernakular : Patutkah Didefinisikan?"*, © Jurnal SABUA (ISSN 2085-7020) Vol.3, No.2, Agustus 2011, Prodi PWK, , Fakultas Teknik UNSRAT, Manado, (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/242>)
- Simpson Grant A. & James B. Atkins, 2005, *"Master and Commander: The Architect's Authority"*, © The American Institute of Architects (AIA), ([http://info.aia.org/aiarchitecture/thisweek05/tw1104/tw1104bp\\_riskmgmt.cfm](http://info.aia.org/aiarchitecture/thisweek05/tw1104/tw1104bp_riskmgmt.cfm))
- Tuttle Alexander D., 2013, *"Reclaiming the Architect's Authority"*, © Lepatner & Associates LLP, 575 Lexington Avenue, New York, (<http://lepatner.com/wp-content/uploads/2013/05/Reclaiming-Architects-Authority1.pdf>)
- Van Kooy Mathew, 2007, *"The Authority of the Architect: concerning discourse and method"*, presented as part of the Architecture+Philosophy public lecture series 12 April 2007 at Federation Square, Melbourne, ([www.architecturephilosophy.rmit.edu.au](http://www.architecturephilosophy.rmit.edu.au)), © M. Van Kooy,
- Zeisel John, 2006, *"Inquiry By Design: Tools for Environment - Behavior Research"*, © Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Authority>